

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kota Magelang

Halaman 24

Kemenkeu Apresiasi Transparansi Keuangan

Magelang Raih Tiga Penghargaan

MAGELANG - Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang benar-benar patut diapresiasi. Sebab, tiga penghargaan diraih pada 2017 yang semuanya mengarah pada pengelolaan keuangan.

Pertama, status opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017. Kedua, penghargaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) untuk dua kategori sekaligus. Terbaru anugerah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito yang diwakili Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina menerima penghargaan itu di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, kemarin. Anugerah diberikan kepada daerah yang memperoleh Opini WTP dalam LKPD 2012-2016 dan terbukti telah menerapkan sistem akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Larsita mengatakan, penghargaan ini diraih berkat peranan Wali Kota yang getol membimbing pengelolaan keuangan daerah. Wali kota selalu mendorong agar pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, dan inovatif.

"Anugerah ini membuktikan kalau pengelolaan keuangan di Kota Magelang sudah baik di bawah kepemimpinan Bapak Sigit Widyonindito. Karena itu, untuk tahun ini saja sudah mendapat tiga penghargaan sekaligus yang khusus di bidang



Sigit Widyonindito

pengelolaan keuangan," ujarnya.

Standar Akuntansi

Dia menjelaskan, opini WTP dari BPK belum lama ini didapat lantaran dari sekian aspek seluruhnya berhasil dijalankan Pemkot, seperti ketaatan asas peraturan perundangan, kecukupan dan pengungkapan laporan, kepatuhan terhadap undang-undang, dan efektivitas internal.

"Empat aspek ini menjadi standar akuntansi pemerintahan. Kota Magelang dianggap berhasil menjalankan, sehingga meraih opini WTP dalam LKPD 2012-2016," katanya.

Nilai tambah lainnya, kata Larsita, pihaknya sejak dulu sudah menerapkan transparansi tingkat tinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Bahkan, ihwal kebutuhan informasi tentang keuangan daerah mulai tahun ini masyarakat dapat

dengan mudah mengaksesnya.

"Otomatis jika masyarakat tahu informasi, mereka bisa mengontrol. Hal ini ternyata menjadi penilaian tersendiri lembaga perguruan tinggi UGM, sehingga kami meraih dua kategori sekaligus dan menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang meraih penghargaan ini," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk merealisasikan keterbukaan informasi, mulai tahun 2016 BPKAD juga memtransformasi sistem manual ke pemanfaatan teknologi informasi (TI). Hingga akhir 2017 ditargetkan tiga aplikasi terintegrasi sudah dapat difungsikan, antara lain *e-budgeting khusus*, *e-planning*, dan *e-reporting*.

"Rencana akhir tahun sudah bisa dijalankan. Program dan terobosan kami ini bentuk keseriusan, bahwa ke depan tata kelola keuangan akan semakin baik dan benar-benar transparan," tandasnya.

Selain itu, pada 2018 BPKAD juga menargetkan semua transaksi menggunakan nontunai. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dan meminimalisasi pontesi penyelewengan.

"Contohnya kalau ada bansos, nanti siapa saja yang mendapat bisa diketahui oleh masyarakat. Di sini peran masyarakat bisa mengontrol program-program transparansi keuangan," ungkapnya. (PI.H88-27)